

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KABALITBANG DIKLAT KUMDIL .	i
KATA PENGANTAR KAPUSLITBANG KUMDIL	iii
SEKAPUR SIRIH	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
1. Spesifikasi Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Tahap Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	19
BAB II KONSEP DASAR DISKRESI DAN	
KEPUTUSAN PEJABAT PUBLIK	21
A. Dasar Pemikiran Diskresi di Beberapa Negara Sebagai Sebuah Perbandingan	21
1. Diskresi di Negara Inggris	21
2. Diskresi di Negara Belanda	25
3. Diskresi di Negara Jerman	31
B. Konsep Kewenangan Pejabat Publik sebagai Dasar Melakukan Diskresi Keputusan	35
C. Konsep Hermeneutika Dalam Ilmu Hukum	41

BAB III	MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (MENURUT PERSPEKTIF DOGMATIKA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAHKAMAH AGUNG)	49
	A. Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Menurut Perspektif Dogmatika Hukum Administrasi Negara dan Hermeneutika Hukum	49
	1. Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Menurut Perspektif Dogmatika Hukum Administrasi Negara	49
	2. Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Menurut Perspektif Hermeneutika Hukum	79
	B. Pemaknaan Mahkamah Agung Kasus-Kasus Tentang Diskresi Keputusan Pejabat Publik	97
	1. Paradigma Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara	97
	2. Pemaknaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Diskresi Keputusan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik	100
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA	133